

# **BAB VI**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas dalam BAB V sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan pembinaan sebagai bentuk implementasi dari peraturan daerah no 17 tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dibagi menjadi beberapa program di antaranya:

#### **A. Sosialisasi**

- Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan DLHK terkait pengurangan penggunaan kantong palastik di Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik. Dari hasil di atas yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat sebagai sasaran baik dari pengguna maupun penyedia kantong plastik dan pelaku usaha berpendapat bahwa mereka sudah mengetahui mengenai aturan yang membidangi pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung dari berbagai media, media tersebut baik berupa cetak seperti: Koran, flyer, baliho, poster, media elektronik, dsb. Disisi lain informasi yang didapat juga secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- Sosialisasi yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian, diantaranya:

- sosialisasi secara langsung: talkshow yang dilaksanakan di cfd pada hari libur, di pasar tradisional dilaksanakan pada hari biasa, beberapa sekolah dilakukan pada hari biasa, kantor pemerintahan dilakukan pada hari biasa, dsb.
- Sosialisasi secara tidak langsung: bekerjasama dengan Kominfo untuk memberikan informasi melalui media, penyebaran flyer mengenai diet kantong plastik yang dibantu oleh rekan relawan, poster serta iklan-iklan di Koran dan media elektronik lainnya.

## **B. Konsultasi**

- Pada pelaksanaan program berupa konsultasi ini , DLHK belum melaksanakannya dengan baik hingga saat ini. Dapat diartikan bahwa pada pelaksanaan konsultasi ini yang ditujukan kepada seluruh sasaran baik dari produsen, penyedia kantong plastik, pelaku usaha, dan pengguna kantong plastik belum dilakukan dengan semestinya dan bahkan ketidak konsistenan DLHK beserta tim SKPD selaku pelaksana dan penanggungjawab Perda no 17 tahun 2012 ini menjadi suatu indikasi penyebab kurang baiknya implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung ini.
- Program berbentuk konsultasi ini hanya dilakukan kepada beberapa sasaran saja belum dilakukan secara menyeluruh. Serta konsultasi ini berbentuk lebih formal yang dilaksanakan di kantor DLHK, dengan keterbatasan

ruang dan tempat juga menjadi suatu penyebab tidak terlaksananya program ini dengan baik dan menyeluruh.

### **C. Pelatihan**

- Pada pelaksanaan pelatihan sebagai bentuk dari aktifitas pelaksanaan kebijakan ini, semestinya dilakukan oleh DLHK sebagai salah satu pelaksana kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung ini terhadap sasaran kebijakan dari mulai produsen, penyedia kantong plastik, pelaku usaha dan pengguna kantong plastik. Akan tetapi pada pelaksanaannya berbanding terbalik dapat diartikan bahwa pelaksanaan pelatihan ini dilakukan oleh DLHK sebagai bentuk pelatihan kepada pihak intern atau DLHKnya sendiri guna melaksanakan program kebijakan ini dengan baik. Kurang jelasnya mengenai aturan yang membidangi program pelatihan ini menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan program antara yang tertera dalam Perda dengan di lapangan.
- Pihak DLHK hanya mengartikan bahwa bentuk dari pelatihan ini tidak untuk dilakukan kepada masyarakat sebagai sasaran, akan tetapi bentuk dari pelatihan ini teruntuk pihak yang melaksanakan kebijakan ini agar lebih menguasai program-program yang akan di implementasikan.

### **D. Bantuan teknis**

- Pada pelaksanaan bantuan teknis ini DLHK sebagai salah satu pemerintah yang menjalankan mandat dari kebijakan pengurangan penggunaan kantong

plastik di Kota Bandung, cukup baik dalam melakukan program tersebut.

Dapat diartikan bahwasanya bantuan teknis berupa barang alternatif sebagai pengganti kantong plastik yang tidak ramah lingkungan sudah dilakukan.

- Bentuk dari bantuan teknis tersebut berupa kantong goodybag/totebag, serta kantong plastik ramah lingkungan yang di bagi ke 3 pasar tradisional di Kota Bandung sebagai bentuk dari bantuan teknis dari pemerintah. Goodybag/totebag tersebut dibagikan kepada masyarakat di CFD dan tempat-tempat lain di Kota Bandung sebagai bentuk dari kampanye agar mengurangi penggunaan kantong plastik.

2. Sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung, DLHK sebagai salah satu pelaksana kebijakan ini wajib melakukan pengawasan terhadap :

#### **A. Produsen**

- Pengawasan terhadap produsen dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung ini tidak dilakukan hingga saat ini. Menurut salah satu staff DLHK saat ini memang pelaksanaan pengawasan belum di lakukan untuk sasaran produsen kantong plastik. Maka dari itu hasil dari implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini tidak sesuai dengan tujuannya.
- Disisi lain produsen yang membuat kantong plastik di Kota Bandung masih sangat sedikit bahkan banyak terdapat di daerah luar Kota Bandung. Hingga

saat ini kantong plastik yang beredar di Kota Bandung ini banyak di kirim dari berbagai daerah, oleh sebab itu DLHK belum menargetkan produsen kantong plastik menjadi sasaran utama pemberian pengawasan secara langsung.

### **B. Pelaku usaha**

- Pada pelaksanaan pengawasan sebagai bentuk dari kegiatan DLHK untuk melihat bagaimana hasil dari pelaksanaan program yang sudah di tetapkan baik atau tidak, sasaran selanjutnya yang di awasi adalah para pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. DLHK sudah melaksanakan pengawasan ini kepada pelaku usaha, dalam pelaksanaanya DLHK lebih mengawasi peredaran penggunaan kantong plastik ini kepada para pelaku usaha berbadan hukum seperti alfamart, Cirkle K, indomart, dsb.
- Kurang optimalnya pelaksanaan kepada pelaku usaha ini menyebabkan implementasi Perda no 17 tahun 2012 ini kurang baik. Dapat diartikan bahwa ketidakkonsistenan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut yang saat ini sudah kurang terlaksana dengan baik.

### **C. Penyedia kantong plastik**

- Pada pelaksanaan pengawasan juga dilakukan kepada pihak penyedia kantong plastik, seperti yang sudah di jelaskan pada bab V DLHK sebagai salah satu penanggungjawab dan pelaksana kebijakan pengurangan

penggunaan kantong plastik ini sudah melakukan pengawasan terhadap penyedia kantong plastik . hal tersebut sama halnya dilakukan seperti kepada pelaku usaha dan pengguna kantong plastik, akan tetapi belum sepenuhnya di laksanakan dengan baik.

- DLHK mengevaluasi hasil dari pengawasan tersebut yang menyatakan bahwa penggunaan kantong plastik di Kota Bandung ini sudah menurun hingga 40 %. Mereka melihat dari data yang diminta dari setiap ritel minimarket dan observasi langsung ke lapangan.

#### **D. Pengguna kantong plastik**

- Pada pelaksanaan pengawasan kepada pengguna kantong plastik yang dapat dikategorikan adalah seluruh masyarakat di Kota Bandung ini, belum terlaksana dengan semestinya. Tim SKPD yang di buat oleh pemerintah yang salah satunya adalah DLHK belum konsisten dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi penggunaan kantong plastik di kalangan masyarakat.
  - Sanksi berupa teguran yang seharusnya diberikan kepada pengguna yang masih menggunakan atau tidak taat kepada aturan ini belum terlaksana dengan semestinya.
3. Dalam penulisan ini keberhasilan suatu implementasi kebijakan Perda no 17 tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung juga Dilihat dari 5 indikator menurut Repley and franklin :

- Ada beberapa program pembinaan dan pengawasan yang tidak banyak melibatkan aktor dalam pelaksanaannya. Dengan begitu maka yang terjadi adalah program tersebut hingga saat ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- Kompleksitas program atau Perda tersebut yang cukup rumit membuat para pelaksana kebijakan tersebut kesulitan dalam mengimplementasikan program tersebut.
- Terdapat kelanjutan aturan berupa Perwal yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan yang hingga saat ini belum tertandatangani oleh Wali Kota Bandung yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Bandung ini tidak konsisten dan tidak efektif.
- Factor di luar teknis juga dapat memperlambat pelaksanaan yaitu dengan terlalu luasnya sasaran kebijakan dari Perda no 17 tahun 2012 ini membuat DLHK beserta tim SKPD cukup kesulitan dalam melaksanakan program-programnya.
- Kurangjelasnya tujuan dari setiap program juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Para aktor yang melaksanakan program tersebut kurang memahami setiap programnya yang diakibatkan adalah ketidak konsistenan dalam melaksanakan program tersebut.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti akan memberikan saran kepada DLHK sebagai salah satu pelaksana dan penanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Peraturan daerah no 17 tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung dan stakeholder lain yang terkait dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Saran Tersebut berupa:

1. Mengenai sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan cukup baik tersebut maka, penulis disini akan memberikan saran guna dalam melakukan sosialisasi kedepannya dapat lebih baik lagi. Sosilasisasi yang dilakukan oleh DLHK untuk saat ini dan kedepannya perlu penambahan sumberdaya agar dapat lebih menyebar informasi mengenai pentingnya mengurangi kantong plastik. serta pemberian informasi kepada masyarakat harus terus dilakukan baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.
2. DLHK sebagai salah satu peaksana dan penanggung jawab harus lebih Konsisten dalam melaksanaka program kebijakan ini. Serta perlu di perkuat guna keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung.
3. Aturan yang jelas juga sangat membantu pelaksana dalam menjalankan mandatnya. Dapat diartikan bahwa aturan yang kurang jelas masih menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh DLHK beserta tim SKPD lainnya.



4. Pemerintah terkait sebagai pelaksana kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung perlu bekerja sama dengan pihak ke 3 agar pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini dapat lebih terlaksana dengan baik.
5. DLHK beserta tim SKPD lainnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik ini harus memberi sanksi sesuai apa yang sudah ditetapkan dalam Perda no 17 tahun 2012 kepada sasaran yang melanggar.
6. Memastikan target sasaran yang diutamakan bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan agar tidak terlalu kompleks. Karena saat ini kompleksitas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan tersebut.
7. DLHK perlu memahami dan mendalami setiap program-program terkait pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari apa yang seharusnya di lakukan dan yang terjadi dilapangan. Seperti bentuk pelatihan yang seharusnya pelatihan itu di lakukan oleh DLHK kepada sasaran tetapi pada pelaksanaanya berbanding terbailk.
8. Perwal yang mengatur kelanjutan dari pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik itu harus segera di tandatangani oleh Wali Kota Bandung guna kelancaran dalam melaksanakan program pengurangan kantong plastik ini. Sebab dengan adanya kelanjutan aturan yang mengatur kebijakan ini tetapi hingga saat ini

aturan tersebut berupa perwal belum sah untuk di keluarkan menajdi penyebab ketidak konsistenan dalam menajalankan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung:AIPI.
- John W Creswell. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Parsons Jakarta: Kencana Prenada Media Group., weynes, 2006. *Public Policy* “Pengantar Teori dan Politik Analisis Kebijakan”.
- Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin. 1986. “*Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition*”. Dorsey Press, Chicago, ILLinois,
- Riant D Nugroho. 2009. *Public Polic*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Ripley & Franklin, 1982. *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press. Chicago.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,.
- Dunn William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UGM press: Yogyakarta. Rosdakarya
- Natsir. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: GHImia Indonesia.

Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Bandung

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### **Dokumen**

UU 1945 pasal 28H

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan.

Dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung

Peraturan Daerah no 17 tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik  
Kota Bandung

Peraturan Pemerintah No38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota.

### **Website**

<http://www.dpr.go.id/uu/uu1945>. Diunduh pada tanggal 13 february 2016 pukul

14.20

National news.id. . Di unduh pada tanggal 14 february 2016. pukul 14.45

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-Analisis%20implementasi->

Literatur.pdf. Di unduh pada tanggal 3 maret 2017 pukul

<http://digilib.unila.ac.id/302/11/BAB%20II.pdf> Di unduh pada tanggal 3 maret 2017

pukul 12.30

[http://tka-online.naker.go.id/pdf/pp\\_38\\_2007.pdf](http://tka-online.naker.go.id/pdf/pp_38_2007.pdf). Di unduh pada tanggal 13-4-2016

pukul 20.54

[http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_32\\_2004\\_Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf) Di

unduh pada tanggal 13-4-2016 pukul 23.21

<http://www.dprd-pemalangkab.go.id/691/dprd-dan-eksekutif-harus-perhatikan-tujuan-pembentukan-perda/>. Di unduh pada tanggal 14 february 2017 pukul 15.00

<http://repository.uin-suska.ac.id/4414/3/BAB%20II%282%29.pdf> Di unduh pada hari

sabtu 14 oktober 2017

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30985/Chapter%2011.pdf;jsessionid=8B13ED029E0CE15D5CA861744C0D42BB?sequence=4> Di

unduh pada hari senin 17 oktober 2017

<http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangularisasi-dalam->

[penelitian-kualitatif.html](http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangularisasi-dalam-penelitian-kualitatif.html) Di unduh pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 21.04

<https://www.jurnalbandung.com/di-bandung-baru-tiga-pasar-tradisional-yang->

[gunakan-kantong-plastik-ramah-lingkungan/](https://www.jurnalbandung.com/di-bandung-baru-tiga-pasar-tradisional-yang-gunakan-kantong-plastik-ramah-lingkungan/) Di unduh pada hari jumat 13 oktober

2017

## **Skripsi**

Sari. 2014. *Pengaruh Kampanye "Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik"*. Jakarta.

Universitas multimedia nusantara

Fathma Romadloniyah. 2012. "*Pembuatan dan Karakterisasi Plastik Biodegradable dari Onggok Singkong dengan Plasticizer Sorbitol*". Yogyakarta.

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

Devi Dwika Lestari. 2017. "*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 hingga 39 Mengenai Larangan Aborsi yang Dikecualikan di Kota Bandung (Studi Kasus LSM*

*PKBI Jawa Barat)*". Bandung. *Universitas Katholik Parahyangan*

## **Jurnal**

Nurhenu Karuniastut. "*Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*", jurnal

Jenis plastik, kode plastik, upaya penanggulangan limbah plastik. Vol. 03

No.1 [http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2- Bahaya Plastik ---](http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-Bahaya_Plastik_---Nurhenu_K.pdf)

[Nurhenu\\_K.pdf](http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-Bahaya_Plastik_---Nurhenu_K.pdf)

Shinta Prastyanti, 2015, jurnal "*Pendekatan Pembangunan Dan Pengentasan*

*Kemiskinan Di Pedesaan*", Vol.11 No1

<http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/Shinta%20Prastyanti.p>

[df](http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/Shinta%20Prastyanti.p)

Untoro Budi Suro dan Ismanto, 2016, " *Pengolahan Sampah Plastik Jenis PP, PET dan PE Menjadi Bahan Bakar Minyak dan Karakteristiknya*".  
Vol.1.No1.[http://ejournal.janabadra.ac.id/index.php/JMST/article/download/UNTORO/pdf\\_4](http://ejournal.janabadra.ac.id/index.php/JMST/article/download/UNTORO/pdf_4)

Hasyim Hasanah, 2016, " *Teknik-Teknik Observasi*", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor.1.[journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932)

Susi Hendriani dan Soni A. Nulhaqim " *Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai*" Vol. 10, No. 2,  
<file:///C:/Users/aariyanto/Downloads/4032-7096-2-PB.pdf>

Arther Nus Tamaka. 2016, " *Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan*", *jurnal Kinerja, Pengawasan*. Vol 1 no 7  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/7591>